

Pengampunan pajak di Indonesia dikaitkan dengan kepastian hukum = The relevance of tax amnesty to legal certainty in Indonesia

Rais Rozali, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20432451&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam kebijakan perpajakan, pengampunan pajak merupakan instrumen kebijakan suatu Negara untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Dalam pelaksanaannya memerlukan instrumen-instrumen pendukung untuk mensukseskan program tersebut. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak lebih dari 1 (satu) kali, mulai dari tahun 1964, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2015. Kemudian digulirkan kembali pada Tahun 2016, pembahasannya sedang berjalan di Dewan perwakilan Rakyat. Tesis ini membahas pengampunan pajak dan pelaksanaannya di Indonesia dan Negara lain, serta kaitan antara pengampunan pajak di Indonesia dengan kepastian hukum. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengampunan pajak memerlukan landasan hukum yang kuat dan instrumen-instrumen pendukung untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.

.....In the context of tax policy, an amnesty constitutes a policy instrument through which a country can stimulate an immediate increase in tax revenue. In practice, it takes a number of other supporting instruments in order for that program to succeed. Indonesia has granted tax amnesty at least four times, in 1964, 1984, 2008 and 2015. In 2016 the same program is set to commence and currently matters relating to its implementation are being discussed in the House of Parliament. This thesis discusses how tax amnesty in Indonesia and other countries is implemented and the relevance of such program to Legal Certainty. This juridical –normative research concludes that the commencement of the tax amnesty program requires a strong legal basis and all the corresponding instruments to ensure successful implementation of the program.